

POLITIK PENGUATAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ISLAM INDONESIA

(Telaah Historis Transformasi FA-UII Ke PTAIN Era
Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim)

Darul Abror

STAI As-Shiddiqiyah Lempuing Jaya OKI Sumsel

E-mail: masdarul1909@gmail.com

Abstract

This study aims to develop scientific treasures on the focus of educational political studies that are not yet familiar in Indonesia, especially regarding the politics of strengthening Islamic education institutions Era of the Minister of Religion K.H.A. Wahid Hasyim Indonesia that has never been studied by anyone, so this study becomes important to study. This study uses "Interest Groups Theory" which has been incorporated in The Politics of Education Association (PEA) as an analysis knife so that it is relevant to the context of the discussion. The method in this study uses the qualitative method "Library Research" with an educational political approach with historical style. Whereas in collecting data obtained do documentation study and interview, and data analysis technique used by qualitative circular analysis technique by describing, classifying and combining. In this study there were two important findings. First, the emergence of a program of strengthening Islamic higher education institutions in Indonesia on the basis of the construction of internal and external factors was the existence of the "Balance Motive" praxis by using a rational and spiritual approach which was emphasized in the concept and practice, namely the balance between science and piety, between logic and morality, between religious and public education, both must complement each other which is confirmed through the political program of his institutional notion which is to establish a "complete Islamic University and library" which makes PTAIN a modern embryo of civilization under the control of the Ministry Religion. The second finding, in practice, is the interaction pattern used by the era of the Minister of Religion of K.H. A. Wahid Hasyim in the process of strengthening Islamic higher education institutions in Indonesia is an interaction pattern of "Accommodative Compromistic Associative", namely the pattern of interaction that has an indication of "balanced" synthesis with secular groups, even training with

the regime, in ways that are more adaptive and prioritize stability and interests all groups by reflecting competitive, compromise, cooperative and tassammuh and tawassuth processes to reduce conflict between groups with the aim of obtaining alternative solutions.

Keywords: Politics, Islamic Higher Education, K.H.A. Wahid Hasyim.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan khazanah ilmiah pada fokus kajian politik pendidikan yang belum familier di Indonesia khususnya tentang Politik penguatan institusi pendidikan tinggi Islam Era Menteri Agama K.H.A. Wahid Hasyim Indonesia yang belum pernah diteliti oleh siapapun, sehingga kajian ini menjadi penting untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan "Interest Groups Theory" yang sudah tergabung dalam *The Politics of Education Association* (PEA) sebagai pisau analisisnya sehingga relevan dengan konteks pembahasan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif "Library Research" dengan pendekatan politik pendidikan dengan corak historis. Sedangkan dalam pengumpulan data diperoleh melakukan studi dokumentasi dan wawancara, dan teknik analisis kualitatif melingkar dengan memerikan, menggolongkan dan menggabungkan. Dalam penelitian ini terdapat dua temuan penting, *Pertama*, munculnya program penguatan institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia atas dasar konstruksi faktor internal dan eksternalnya adalah adanya praksis "Motif Imbang" dengan menggunakan pendekatan rasional dengan spiritual yang ditegaskan dalam konsep dan praksisnya, yakni adanya keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan taqwa, antara logika dan akhlak, antara pendidikan agama dan umum, keduanya

harus saling melengkapi yang ditegaskan melalui program politik gagasan institusionalnya yakni mendirikan “Universitas Islam lengkap beserta perpustakaan” yang nondikotomik, sehingga menjadikan PTAIN sebagai embrio peradaban modern di bawah kontrol Kementerian Agama. Temuan *kedua*, pada praksisnya, pola interaksi yang digunakan era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim dalam proses penguatan institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia adalah pola interaksi “*Asosiatif Akomodatif Kompromistis*” yakni polainteraksi yang memiliki indikasi sintesis “imbang” dengan golongan sekuler, bahkan *bergaining* dengan rezim, dengan cara yang lebih adaptif serta memprioritaskan stabilitas dan kepentingan semua golongan dengan refleksi proses yang kompetitif, kompromistis, kooperatif, dan *tassammuhsertawassuth* untuk mengurangi konflik antar *groups* dengan tujuan mendapatkan solusi alternatif.

Kata Kunci: Politik, Pendidikan Tinggi Islam, K.H.A. Wahid Hasyim.

Pendidikan Islam di Indonesia era orde lama mengalami suatu proses politik dan pendidikan dengan kompleksitas dinamika yang berimplikasi positif maupun negatif. Positifnya hal itu menjadi spirit bagi bangsa untuk lebih asosiatif dengan jiwa nasionalismenya, demikian pula dengan hal negatifnya, adanya signifikansi diskriminasi pendidikan pada tujuan dan esensi pendidikan oleh penjajah Belanda. Hal ini tentunya dapat dipahami secara kompleks dengan multi faktornya dalam fakta-fakta historis. Sehingga perkembangan pendidikan Islam bisa dikatakan terhambat sekaligus tertantang dalam penguatannya khususnya dalam aspek pendidikan di pesantren lebih-lebih di perguruan tinggi Islamnya. Di pesantren, para Kyai sebelumnya memang mengkhawatirkan pendidikan model Eropa yang lebih menekankan pengembangan rasionalitas ilmu pengetahuan dan sikap duniawi yang dinilai dapat melunturkan budi luhur bangsa Indonesia, sehingga mereka memperkuat terlebih dahulu tradisi pendidikan pesantren dalam rangka menjaga budi luhur bangsa. (Dhofier, 2011, 168). Dengan demikian, besarnya harapan umat Islam untuk memperoleh pendidikan yang non-diskriminatif nilai-nilai dengan menjaga etika kemanusiaannya yang tentunya harapan itu tercurahkan kepada

pemangku kebijakan pendidikan Islam, yakni “Kementerian Agama”.

Di era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim memang memiliki realitas sejarah yang jauh dijangkau oleh kaum atau masyarakat awam pada umumnya. Permasalahan yang mendasar di eranya adalah pada masa penjajahan Belanda yang memperkuat basis kolonialisasi sosial, politik maupun ideologisnya. Salah satu peninggalan sejarah yang paling bernilai negatif adalah peninggalan “Dikotomi ilmu pengetahuan” antara pengetahuan Islam dengan pengetahuan umum. Praksis dikotomi ilmu pengetahuan di Indonesia sengaja didesain oleh kelompok “Barat” untuk memperkuat basis ideologis yang berkesinambungan sehingga memiliki implikasi negatif terhadap persatuan bangsa, dengan harapan adanya sekulerisasi sosio-ideologis melalui jalur “pendidikan”, khususnya pada institusi pendidikan Islam di Indonesia, sehingga keberpihakan “Barat” lebih kental dan berpengaruh secara kontinyu.

Hal di atas dapat dilihat dari politik penjajah Belanda pada waktu itu, usaha yang dilakukan penjajah dengan dua hal, yakni kedalam dan keluar, kedalam dengan cara menghalangi pikiran-pikiran modern dalam Islam dengan mempertahankan yang kolot-kolot, kemudian yang keluar dengan mengenalkan dunia terpelajar akan gambaran jelek pada Islam, sehingga enggan untuk ke Islam, dengan kata lain penjajahan tidak hanya dengan cara lahiriyah, melainkan dengan batiniyah, maka penjajahan kebudayaan adalah yang paling penting, hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh ahli pikir penjajah, C. Snouck Hurgronje, dengan tegas bahwa “*memasukkan pendidikan barat pada rakyat, nanti dengan sendirinya ia akan menjauhi pendidikannya yang dulu, artinya pendidikan Islam, “makin lama makin jauh dengan Islam”*.” (Atjeh, 930-931).

Sesuai historis di atas, terdapat dua point dasar bagi peneliti dengan mencoba merenung dan *deep analysis* nilai-nilai historis yang perlu dijelaskan dalam sudut pandang yang lebih signifikan, yakni fokus pada penguatan institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia era Menteri Agama K.H.A Wahid Hasyim. Maka setidaknya ada tiga peristiwa

yang melatar belakangi kondisi sosio-politik yang relevan pada penelitian ini, khususnya atas implikasi negatif kolonialisasi pendidikan yang “Dikotomik” di Indonesia. *Pertama*, Adanya spirit yang tinggi dari golongan nasionalis sekuler dalam proses penguatan paradigma dan kemajuan bangsa yang lebih dikotomik atau yang lebih tepat dengan bahasa sekuler model Barat yang belum relevan paradigmanya dengan identitas keislaman dan kebangsaan Indonesia, khususnya bagi kelompok nasionalis agamis. Dimana golongan nasionalis agamis mayoritas masih dikungkung oleh perasaan tinggi dan lemahnya logika, sedangkan golongan sekuler telah mapan dengan cara pandangnya yang didukung oleh keberpihakan sistem pemerintahan saat itu.

Tentu hal di atas menjadi salah satu alasan yang mendasar bagi kelompok nasionalis agamis memiliki keinginan besar untuk mendirikan Universitas Islam yang tentunya secara politik tidak terlepas atas keberhasilan dari kelompok nasionalis “Sekuler”. Budairy dan Zawawi (2009, hal. 248-249) mengemukakan bahwa, “dalam hal ini, kaum nasionalis sekuler telah mampu menggolkan berdirinya Universitas Gajah Mada (UGM) di Yogyakarta yang mulai digagas sejak 17 Februari 1946 dan tepatnya pada 16 Desember 1949 UGM diresmikan di Yogyakarta. Pada waktu yang sama, K.H. A. Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama RIS juga menghadiri pada acara peresmian UGM tersebut, tentunya hal ini sebagai refleksi nilai-nilai *tasammuh* antar sesama golongan. Salah satu bukti argument dari ketua UGM yang membuat K.H. A. Wahid Hasyim terbangkitkan adalah ketika Prof. Sardjito menyatakan bahwa : “*Letak Universitas Gajah Mada diantara Candi Prambanan dan Borobudur, maka Universitas Gajah Mada haruslah kelak menjelmakan rekarnasi Prambanan dan Borobudur*”. (Suryanegara, Ahmad Mansur, 2016, 287). Mendengar isi pidato tersebut, maka kemudian Menteri Agama RIS KH.A. Wahid Hasyim berupaya semaksimal mungkin merencanakan dan mendirikan Universitas Islam beserta perpustakaannya. (Yusuf dkk, 2017, 67) Pada esensinya komentar Prof. Sardjito

tampaknya memiliki keinginan menjadikan alumninya sebagai pelanjut ajaran Hindu dan ajaran Budha, sehingga menggugah hati K.H. Wahid Hasyim untuk mendirikan Perguruan Tinggi Islam Negeri. (Suryanegara, Ahmad Mansur, 2016, 288). Peneliti lebih memahami makna filosofisnya dari reinkarnasi sebagai proses menghidupkan kembali unsur-unsur kejayaan seperti era sebelumnya sehingga statment tersebut di anggap lebih berpihak pada model kemajuan Hindu-Budha atau lebih tepat menjauh dari nilai-nilai syari’at Islam.

Bahkan yang lebih mendapat sorotan tajam dari peneliti adalah adanya implikasi negatif ideologis dari golongan sekuler yang mengiginkan Kementerian Agama di era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim agar dihapuskan dengan menggabungkan urusan pendidikan pada kementerian pendidikan dan kebudayaan saja. “*Kementerian Agama yang di era tersebut memang masih mendapat serangan tajam dari kelompok sekuler untuk membubarkan Kementerian Agama*”. (Mastuki, HS. 1997. 137-140). Adapun tokoh yang menggugat Kementerian Agama adalah Rasuna Said dan Sirajjudin Abbas, Cs yang menghendaki dibubarkannya Departemen Agama dan Departemen Penerangan dengan alasan bahwa “*kedua departemen ini tidak efisien, dan lebih merupakan ajang rebutan partai-partai tertentu saja jika departemen itu dikuasai oleh partai tertentu saja (Masyumi–NU) yang pada waktu itu dikuasai oleh Partai PNI*”. (Puslitbang Kehidupan Beragama dan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1980/1981, 47-48). Tentunya peristiwa di atas menjadikan tugas berat bagi Kementerian Agama era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim untuk membendung gerakan-gerakan sekuler yang memiliki “sanad ideologis” jelas dari Belanda, yakni Sekulerisme.

Latar historis *Kedua*, adanya kecenderungan rezim memberikan perhatian lebih terhadap golongan sekuler dalam aspek pendidikan tinggi khususnya UGM dan salah satu Universitas peninggalan sosio-ideologis Belanda, yakni UI.

Sesuai apa yang dikatakan oleh Mastuki (2010, 258) yang mengemukakan bahwa “*Pada paruh pertama tahun 1950, upaya pemerintah di level perguruan tinggi terkonsentrasi pada pengembangan dua universitas pada pengembangan dua universitas yang telah ada sebelumnya, yakni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI)—dahulu milik Belanda. Pada 19 Desember 1949 Fakultas yang berpecah disatukan menjadi UGM. Sementara UI dirintis oleh Belanda pada tahun 1940-an dimaksudkan untuk menyatukan semua perguruan tinggi yang ada seperti di Surabaya, Bandung, Bogor dll, dan melalui dekret pendidikan tinggi 1946 dikembangkan menjadi beberapa Universitas yang dimulai dari UI Jakarta 1950, Universitas Erlangga 1954, Universitas Hasanuddin Makassar 1956, ITB 1959, IPB 1963, dan IKIP Jakarta 1964. Sebaliknya, fokus perhatian terhadap pendidikan tinggi Islam yang di naungi di bawah Kementerian Agama memungkinkan juga belum terfikirkan oleh rezim saat itu.*

Hal ini tentunya atas power yang dominan di era pasca kemerdekaan. Salah satunya kekuatan kelompok sosialis dan sekuler seperti sultan syahrir dan Amir Saifudin yang lebih mendominasi. (Suryanegara, Ahmad Mansur, 2016, 289). Maka dengan sistem parlemen tersebut memungkinkan Rezim Soekarno memiliki kecenderungan lebih kepada kelompok nasionalis “sekuler”, salah satunya fokus perhatiannya lebih terhadap pendidikan UGM dan UI (tinggalan belanda) daripada institusi pendidikan Islam atau Pesantren, karena sistem parlemen merupakan sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan, dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.

Latar historis ketiga, Adanya kebutuhan mendesak bagi umat Islam dengan banyaknya alumni Madrasah dan Pesantren yang belum terakomodir pada pendidikan tinggi umum maupun UII sendiri. Hal ini seiring dengan Nata (2001, 231-233), yang mengemukakan bahwa dua alasan yang mendasari terbentuknya perguruan tinggi Islam (PTI) adalah pertama; adanya kebutuhan

umat Islam dengan kondisi banyaknya alumni yang sudah menyelesaikan di sekolah atau madrasah di pesantren. Kedua, semakin besarnya peranan lulusan universitas sekuler model Barat di tengah masyarakat Indonesia dengan sendirinya menantang umat Islam untuk berpikir menyediakan sistem pendidikan tinggi bagi generasi mudanya. Hal ini juga didukung oleh Nor Huda bahwa kasus adanya peraturan di Universitas Islam Indonesia (UII) tentang tolak ukur baku yang dikehendaki bagi pendidikan matrikulasi yang memiliki arti kursus persiapan bagi para murid madrasah harus ditutup. (Huda, Nor. 2015, 330). Permasalahan mendasar di atas tidak bisa dianggap remeh dalam aspek politik, sosial, pendidikan dan ideologi bangsa Indonesia. Sehingga implikasi dari praksis “Sekulerisme” di atas tentunya menjadi tantangan besar era Menteri Agama K.H.A. Wahid Hasyim untuk berpikir dan bertindak maksimal dalam penguatan sistem pendidikan khususnya pendidikan tinggi Islam yang nondikotomik dan berkebangsaan di Indonesia. Walaupun dengan tantangan di atas, K.H. A. Wahid Hasyim memiliki keinginan yang kuat agar para santri tidak lebih rendah kedudukannya dalam masyarakat daripada kaum barat. (Atjeh, H. Aboebakar, 2015, 171).

Selain permasalahan di atas, juga terdapat tantangan besar dalam internal umat Islam sendiri atas hasil dari Konferensi meja Bundar (KMB) Internasional di Den Haag Belanda tahun 1949 yang menjadikan Indonesia dengan dua perdana menteri, yakni perdana menteri Republik Indonesia Serikat (RIS) Muhammad Hatta dengan Menteri Agamanya K.H. A. Wahid Hasyim dan Perdana Menteri Republik Indonesia (RI) A. Halim dengan Menteri Agamanya K.H. Faqih Usman. Tentu sesuatu yang tidak mudah untuk dijalani, sehingga dengan kebijakan di atas, berdampak secara politis di internal perkembangan bangsa Indonesia tidak dinamis, khususnya bagi Umat Islam. Menurut K.H. A. Wahid Hasyim, dualisme kementerian memang menjadi hambatan tersendiri dengan dua perdana menteri, salah satunya dalam pelaksanaan program penguatan pendidikan tinggi Islam yang telah dicanangkan, yakni Pendirian “Universitas Islam”, untuk itu beliau berupaya ada satu kesatuan kementerian agama dengan melakukan konsolidasi efektif

dengan Hatta selaku perdana menteri RIS dan A. Halim selaku perdana menteri RI untuk membentuk Negara kesatuan dengan menyatukan dua kementerian dan melebur menjadi satu. (Azra dan Umam, 1998, 83).

Sehingga Deliar Noer, (1987, 197) mengemukakan bahwa *“percaturan politik di Indonesia pada tahun 1950-an. Salah satu faktor utamanya adalah bukan lagi pada faktor keamanan “kemerdekaan” dan lainnya, melainkan sejauhmana kedekatan para pemimpin partai politik dengan presiden dan tentara serta dengan para pemimpin partai lain”*. Partisipasi rezim memang tidak bisa dihindarkan dengan sistem parlementernya, akan tetapi faktor relasi intrinsiknya dan track recordnya tentu juga menjadi pertimbangan dan lebih penting. Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh Harry J. Benda (1957, 313) bahwa *“pengaruh tokoh sentral pesantren K.H. Hasyim Asy’ari dalam hal ini sebagai pembuka jalan kompromi antara Indonesia Jepang, dengan kondisi yang sudah tua, tentunya secara eksplisit rekomendasi terhadap puteranya dalam mengembangkan pola dan proses politik Nasional kepada K.H. Wahid Hasyim, tentunya K.H. Wahid Hasyim sendiri memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap Islam di Indonesia”*. Sampai pada dijadikannya sebagai Menteri Agama, bukannya tanpa pertimbangan, melainkan atas tingginya spiritnya di era revolusi saat itu. Demikian Azra dan Umam (1998, 89) mengemukakan bahwa *“Tahun 1945-1950 merupakan periode kesatuan dalam perjuangan, sedangkan dalam tahun 1950-1955 adalah perebutan partai-partai dalam memperoleh kekuasaan, dan era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim sebagai Menteri era Konsolidasi dan Pembelaan eksistensi Kementerian Agama”*.

Disisilain atas realitas permasalahan sosio-politik di atas, K.H. A. Wahid Hasyim memiliki cita-cita tinggi agar bangsa Indonesia memiliki identitas yang khas dengan mensitesikan antara pengetahuan agama dan umum, ilmu pengetahuan dan taqwa, antara logika dan akhlak, keduanya harus saling melengkapi dan telah ditegaskan dalam program Kementerian Agama RIS untuk *“mendirikan Universitas lengkap beserta perpustakaan”*. Sesuai dengan apa yang

tegaskan oleh Azra dan Umam, (1998, 91) bahwa *“pada masa kementerian agama K.H.A. Wahid Hasyim, berupaya dengan gagasan konstruktifnya dengan tujuan menyeimbangkan ilmu pengetahuan umum dan agama dengan dasar taqwa dalam pandangan Islam yang tidak mungkin dijauhkan dan harus sama-sama cukup lengkap sebagai syarat hidup”*. Tentunya tujuannya untuk membangun jiwa bangsa Indonesia agar bisa berpikir maju, modern dan moderat yang dilandaskan pada spirit keagamaan yang tinggi.

Untuk itu, sesuatu yang menggelitik peneliti dalam kajian ini adalah mengapa program penguatan pendidikan tinggi Islam di Indonesia itu muncul di era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim? dan Bagaimana pola interaksi sosio-politik dalam penguatan pendidikan tinggi Islam di Indonesia era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim tersebut?, sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan yang non-dikotomik padahal beliau secara *“formalitas”* tercatat dalam sejarah belum pernah mengenyam pendidikan formal seperti tokoh-tokoh lain semasanya, akan tetapi mampu memformalisasikan institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia dengan cara yang ilham, kosmopolit berbasis persaudaraan. Tentu kajian ini penting dan bernilai serta menarik untuk diteliti.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kajian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan politik pendidikan yang bercorak historis, sehingga penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Creswell, (2014, 4-5), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam konteks ini sebagaimana dikemukakan Bakker dan Zubair masalah yang dikaji termasuk dalam kategori materi kefilosofan dengan model penelitian historis-faktual mengenai peran tokoh. (Bakker dan Zubair, 1994, 61), Disisilain, Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia terkadang perspektif berdasarkan peneliti sendiri. (Gunawan,

2014, 80). Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik pendidikan, khususnya pada prosesnya penguatan pendidikan tinggi Islam dengan telaah historis politis yang bersifat deskriptif pada transformasi Fakultas Agama UII ke PTAIN di era menteri Agama Wahid Hasyim. Kajian sejarah merupakan kajian yang mengungkapkan fakta-fakta itu menjadi karya ilmiah yang bermakna. dalam konteks politik pendidikan, tentunya membahas manuver-manuver kepentingan dan kekuatan antar kelompok dan antar kekuatan, maka dalam konteks ini sebenarnya sangat relevan jika dalam penelitian historis ini juga bisa jadi membahas tentang fakta-fakta, peristiwa dan kasus. (Cresswell, 2009, 20), yang terjadi di era itu.

Sukardi, (2014, 18), mengemukakan penelitian semacam ini secara umum dapat dilakukan dengan empat langkah, yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Heuristik adalah langkah pengumpulan dan pemburuan berbagai sumber data sejarah melalui pelacakan atas berbagai dokumen sejarah, situs sejarah, dan wawancara dengan orang-orang tertentu. Langkah kritik adalah upaya peneliti untuk mengkritisi dan menguji sumber dan data sejarah yang sudah dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti sejarah harus melakukan kritik ekstern dan kritik intern. Kritik Ekstern dilakukan untuk menguji keaslian atau otentitas sumber sejarah dan membedakan antara sumber sejarah yang asli dengan yang palsu. Kritik intern dilakukan untuk menguji validitas data sejarah. Kritik ekstern dan intern menghasilkan fakta sebagai data yang telah terseleksi. Langkah Interpretasi adalah upaya peneliti untuk menafsirkan berdasarkan perspektif tertentu-fakta sejarah sebelum dan selama proses rekonstruksi fakta itu menjadi bentuk dan struktur yang logis. Langkah historiografi adalah menuliskan hasil penafsiran di atas menjadi tulisan atau karya sejarah yang utuh dan bermutu. (Sukardi, 2014, 18-19), Analisis ini bersifat deskriptif, yakni analisis yang berupaya memaparkan fakta-fakta sejarah apa adanya tetapi juga berangkat dari kajian sejarah yang sudah ada sebelumnya.

Menurut M. Sirozi, (2004, 99), mengemukakan dokumen sesungguhnya adalah sumber data yang siap pakai, dalam bentuk

rentangan luas bahan tertulis dan fisik termasuk catatan umum atau arsip. Karena kajian ini secara garis besar banyak berkaitan dengan proses politik pendidikan di era menteri agama Wahid Hasyim maka sumber primernya adalah dokumen, rekaman-rekaman kuantitas (*Quantitatif Records*), kesaksian (*Oral Testimonies*), dan *Relics*. (Sanjaya, 2013, 116-117). Sehingga dengan demikian, dapat diungkapkan dengan jelas dan akurat tentang proses penguatan pendidikan tinggi Islam di Indonesia era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim khususnya pada transformasi Fakultas Agama UII Ke PTAIN. Dalam hal ini tentunya pertelaan-pertelaan pada suatu konferensi, tulisan K.H. A. Wahid Hasyim, teman serta lawan politiknya yang samasa, seta buku sejarah hidup Wahid Hasyim dan karangan tersiar yang disusun oleh Aboe Bakar Atjeh tentunya juga bisa menjadi sumber primer pada penelitian ini, karena beliau adalah satu-satunya penulis yang memahami dan mengerti serta mengumpulkan karya-karya K.H. A. Wahid Hasyim sekaligus tokoh yang hidup di masa itu khususnya fokus pada kajian pendidikan tinggi Islam, dan yang terpenting lagi adalah beliau merupakan salah satu tim yang disusun sesuai peraturan Menteri Agama (PMA) NO. 4 Tahun 1954 tentang panitia penyusun riwayat hidup dan karangan tersiar K.H. A. Wahid Hasyim.

Dengan demikian, layak jika buku tersebut menjadi dokumen primer dalam penelitian ini. Selain itu, Atjeh juga hidup semasa dengan Wahid Hasyim sebagai bidang penerbitan era menteri agama RIS Wahid Hasyim. Sedangkan sumber sekunder adalah karya-karya dan tulisan-tulisan yang relevan dan mendukung kajian ini, hal ini dari beberapa buku rujukan yang penting dan mutakhir, serta di akui secara ilmiah, salah satunya adalah pada karya Azumardi Azra dan Saiful Umam tentang Menteri-Menteri Agama Biografi Sosial Politik dan beberapa penelitian lain yang relevan. Serta buku-buku tentang politik pendidikan dan hasil penelitian serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Mengingat penelitian ini bersifat kepustakaan dengan mengumpulkan dokumen terkait yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan tingginya, strategi, rencana dan dampaknya. Suharsimi mendefinisikan bahwa, metode

dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. (Arikunto, 274). Dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter, bahan dokumenter antaralain, (a) Otobiografi, (b) Surat-surat pribadi, (c) Kliping, (d) Dokumen Pemerintah maupun swasta, (e) Cerita Roman dan cerita rakyat, (f) Data *diserver* dan *flashdisk*, (g) data tersimpan di *Wib site*, dll. (Bungin, 125). Sanjaya (2013, 116), juga mengemukakan dokumen adalah segala macam yang mengandung informasi baik di tulis maupun di cetak. Penyusunan data dengan menggunakan bibliografi fungsional adalah menyusun, mengedit dan mengklasifikasi data sesuai fungsinya untuk masing-masing permasalahan. Sementara yang dimaksud bibliografi final adalah memilih, mereduksi, dan menyajikan data sesuai karakteristik permasalahan, hingga terkumpul dan secara final. Data dokumen terutama merupakan sumber yang bagus untuk studi kasus kualitatif karena mereka bisa mengadakan penyelidikan dalam konteks masalah yang diselidiki. (M. Sirozi, 2004, 99).

Pemahaman penulis mengenai penguatan transformasi fakultas agama UII ke PTAIN Menteri Agama Wahid Hasyim dalam proses formulasi kebijakan tersebut bersifat politis. Forwad menyatakan “setiap analisis serius mengenai pertanyaan tentang kebijakan umum dengan cepat meluas menjadi pembahasan tentang politik pada umumnya dan masyarakat secara keseluruhan” (M. Sirozi, (2004, 8). M. Sirozi juga menambahkan bahwa kajian politik pendidikan bukan merupakan kajian konsep pendidikan Islam, atau kebijakan pendidikan Islam atau pada ideologis pendidikan Islam, bahkan bukan pula kajian ini merupakan kajian politik Islam, tapi yang benar adalah kajian tentang proses politik M. Sirozi, (2004, 8). Dalam penguatan pendidikan tinggi Islam di era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim dalam transformasi Fakultas UII ke PTAIN pada tahun 1949-1952 di Indonesia. Komunikasi dan konsolidasi di era Menteri Agama RIS Wahid Hasyim dengan Menteri Agama RI Faqih Usman telah meyakinkan kepada rezim dalam memberikan pertimbangan

kebijakan tentang urgensi pendidikan tinggi Islam Negeri di bawah Kementerian Agama saat itu.

Kajian ini dirancang untuk memberikan uraian analisis deskriptif dengan memaparkan fakta-fakta sejarah apa adanya tetapi berangkat dari kajian sejarah yang sudah ada sebelumnya serta atas urutan sejarah di era Menteri Agama Wahid Hasyim dalam Mentranformasi pendidikan Tinggi Islam di Indonesia, Juga akan dijelaskan pola hubungan antara kementerian agama RIS Era Wahid Hasyim dengan era menteri RI agama Fakhri Usman, sampai pada proses ratifikasi peraturan pemerintah No. 34 Tahun 1950, karena hal tersebut adalah bagian representasi kebijakan dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam dengan transformasi Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia (UII) menjadi PTAIN di Yogyakarta. Dikatan dengan cara lebih sederhana, kajian ini mencakup usaha untuk mengembangkan laporan historis politis mengenai mengapa ide itu muncul di era Menteri Agama Wahid Hasyim dan pola interaksinya dalam proses tersebut.

Kajian politik pendidikan ini lebih pada kajian proses kebijakan itu dirumuskan, bagaimana sesungguhnya kebijakan di buat, yakni tindakan apa yang dilakukan berbagai pelakunya. Kajian ini juga dirancang untuk menggambarkan dan menganalisis ranah dan proses transformasi pendidikan tinggi di Indonesia, menjajaki keterkaitan nilai, kepentingan dan sumber daya manusia di era Menteri Agama Wahid Hasyim. Dan kajian ini juga bisa dijelaskan sebagai kajian isi kebijakan karena kajian ini berfokus pada preferensi kepentingan era Menteri Agama Wahid Hasyim. Selain itu kajian ini juga dijelaskan suatu analisis advokasi (pembelaan) proses.

Adapun analisis data pada penelitian ini dengan analisis historis yang bersifat politis di era Menteri Agama K.H. Wahid Hasyim, maka analisis data dilakukan dengan beberapa tahap, *pertama*, mengklasifikasikan data tentang proses politik penguatan pendidikan tinggi Islam era Menteri Agama Wahid Hasyim, sehingga diketahui mana proses yang lebih tepat dalam sejarah. *Kedua*, menginterpretasikan informasi yang ada, baik dalam strategi dan evaluasi politik pendidikan era Menteri Agama Wahid Hasyim. *Ketiga*, melakukan

analisis, yakni implikasinya atas serangkaian tentang Proses Formulasi Kebijakan politik pendidikan Tinggi era Menteri Agama Wahid Hasyim. Sehingga menjadi penting bahwa untuk memberikan satu pola analisis pada kajian ini. Analisis memusatkan perhatian makna pada pemahaman dan pengertian mereka akan keterlibatan mereka. Semua data yang relevan di analisis dan disampaikan dengan kata atau gambar. Oleh sebab itu analisis ini bersifat kualitatif. Ini mengikuti proses melingkar dengan melibatkan proses memerikan, menggolongkan dan antar hubungan, seperti yang disampaikan ey, (M. Sirozi, 2004, 111).

Langkah “memerikan” dalam proses melingkar ini mencakup laporan yang tuntas dan komprehensif mengenai konteks, proses keterlibatan di Era Menteri Agama Wahid Hasyim dalam proses transformasi Fakultas Agama UII ke PTAIN. Ketiga aspek di atas tidak dinyatakan dengan sesederhana mungkin, melainkan dengan semaksimal mungkin yang mencakup informasi deskriptif tentang konteks kegiatan, niat, tujuan, strategi, cara yang mengatur dari era Menteri Agama Wahid Hasyim serta dampak dari prosesnya tersebut. Konteks ditempatkan untuk menempatkan kegiatan dan menjangkau latar sosial tempat kegiatan terjadi dan waktu terjadinya. Di era Menteri Agama Wahid Hasyim dipakai untuk menjelaskan bagaimana mereka merumuskan situasinya, dan apa motivasinya yang menggerakkan kegiatan tersebut, sejauhmana proses kegiatannya dan apa tujuannya serta bagaimana cara mereka berinteraksi untuk mempertahankan atau mengubah kegiatan/programnya.

Langkah menggolongkan dalam siklus ini adalah proses konseptual yang dipakai untuk menilai karakteristik data dan kemudian memasukkannya ke dalam berbagai data. Dan untuk dapat fokus pada analisis diperoleh dengan beberapa sumber, kesimpulan dari data, pertanyaan penelitian, substansi, kebijakan dan masalah teoritik dan imajinasi, intuisi dan pengetahuan sebelumnya. Kemudian langkah akhirnya adalah menghubungkan, dilakukan dengan memeriksa penyimpangan atau sesuatu yang kurang sesuai,

ragam, dan kegagalan di dalam data lalu semuanya dikumpulkan bersama.

Ketiga langkah ini bersifat deskriptif dan interpretatif, semuanya dimaksudkan untuk memberikan pemerian analitik tentang data yang relevan bagi proses perumusan kebijakan pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Pemaparan data di atas sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberikan kemungkinan memberikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Gunawan, 211). Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan analisis dan pemahaman sajian data peneliti. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. (Sugiyono, 341) Sehingga dengan langkah tersebut penting disusunnya laporan dari substansi kajian ini yang memungkinkan menghasilkan teori yang bisa digunakan di era kontemporer dengan tetap berdasarkan sejarah dan pengembangan tersebut.

Kajian teori

Kajian penelitian ini lebih difokuskan pada politik penguatan institusi pendidikan tinggi Islam dengan menilik lebih jauh tentang faktor-faktor munculnya program penguatan pendidikan tinggi Islam era menteri agama Wahid Hasyim, dan sekaligus pola interaksi yang digunakan era menteri agama Wahid Hasyim dalam penguatan pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Untuk memperoleh data ini, secara teoritik diperlukan kerangka teori yang menjadi pisau analisis sekaligus menyangkut hal-hal yang dianggap dominan dalam kajian politik pendidikan Islam.

Maka secara teoritis penulis menggunakan teori yang sudah layak dan baku dalam konteks kajian politik pendidikan. Sesuai dengan M. Sirozi, (2013, 41-42) yang membidangi dalam fokus kajian ini, beliau menyarankan bagi para peneliti yang berminat fokus pada kajian politik pendidikan secara konseptual untuk mempelajari dan menggunakan teori yang telah tergabung dalam *The Politics of Education Association (PEA)* agar kerangka konseptual dalam penelitian tersebut lebih tepat, terarah dan akurat secara konseptual, salah satunya yang menurut penulis tepat

digunakan sebagai *Grand Theory* dalam konteks penelitian ini adalah *Interest Group Theory* (Teori Kelompok Kepentingan) yang dikembangkan oleh Bentley. (M. Sirozi, 2013, 41-45)

Menurut perspektif teori kelompok kepentingan, politik pendidikan adalah sistem kelompok kepentingan yang kompleks dan berubah-ubah (*complex, changing systems of interest groups*), bentuk-bentuk pluralisme yang sedang berjalan (*forms pluralisme at work*), yang satu sama lain saling usil (*fussing*) dan saling menjatuhkan (*tumbling*), ketika mereka meredefinisikan isu-isu terkait dan mengambil langkah-langkah untuk merapat pada kelompok-kelompok simpatisan lain. Mereka satu sama lain sering bertarung untuk mendapatkan kebijakan-kebijakan dan program-program yang mereka inginkan. M. Sirozi, (2013, 5). Karena itu menurut Bentley, teori kelompok kepentingan merupakan kajian esensial tentang pendekatan representasi kepentingan dengan mempertahankan kepentingan satu kelompok dengan tetap melihat dan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan kelompok lain.

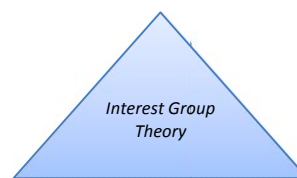
Interest Group Theory (Teori Kelompok Kepentingan) yang disingkat dengan TKK dalam tulisan ini yang dikembangkan oleh Bentley (1908:214) menjelaskan bagian esensial dari teori kelompok kepentingan adalah “*There is no way to get hold of one group interest except in terms of others*” (tidak ada cara untuk mempertahankan kepentingan satu kelompok kecuali dengan melihat kepentingan kelompok-kelompok lain). M. Sirozi, (2013, 46). Pertarungan kelompok-kelompok kepentingan cenderung tidak dalam format saling menutupi, tetapi dalam format saling memahami, menyesuaikan atau kompromi. Untuk itu, asumsi penulis, *Interest Group Theory* merupakan kajian yang lebih dominan pada proses eksistensi kepentingan kelompok dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan kelompok lain melalui kompromi yang transparan yang juga memahami dan menyesuaikan kapasitas dan kondisi masing-masing.

Pada implementasinya, *Interest Group Theory* dalam fokus kajian politik pendidikan peneliti lebih pada aspek permasalahan tingkat

Nasional, yakni adanya implikasi yang inpositif atas kebijakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda dengan mengakibatkan dualisme Perdana menteri dan kementerian Agama, yakni Menteri Agama Republik Indonesia Serikat di Jakarta (RIS) dengan K.H. Abdul Wahid Hasyim sebagai menteri Agamanya dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menterinya, kemudian juga ada Republik Indonesia (RI) yang sudah dibentuk pada tahun 1946 pasca kemerdekaan dengan Menteri Agamanya Fakih Usman yang menggantikan K.H. Masjkur dengan Perdana menteri A. Halim. Sehingga hal tersebut memberikan dampak terhadap lambannya proses perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia khususnya pada proses penyusunan dan implementasi kebijakan Pendidikan Tinggi Islam Negeri yang sudah menjadi bagian rencana di era Menteri Agama (RIS) K.H. Abdul Wahid Hasyim.

Untuk itu karena teori ini sangat dominan dengan konteks masalahnya, maka skala penerapan teori kelompok kepentingan dalam kajian politik pendidikan perlu memperhatikan tiga komponen pokok, *pertama* struktur kelompok kepentingan yang berubah-ubah, *kedua*, program-program yang berubah-ubah, dan *ketiga*, interaksi yang berubah-ubah. M. Sirozi, (2013, 47) Untuk itu penting penulis hidangkan dalam bentuk skema agar lebih mudah dipahami substansi teori dan arah kajian penelitian ini, adapun skema komponen *Interest Group Theory* dapat dilihat di bawah ini,

(1) Struktur Kelompok Kepentingan yang berubah-ubah



Gambar 1. *Interest Group Theory*

(2) Program yang berubah-ubah

(3) Interaksi yang berubah-ubah

Hal ini sesuai dengan esensi pokok dalam *Interest Group Theory* baik pada kelompok

Nasionalis Agamis dan Nasionalis Sekuler pada masa itu, adakah kesesuaian antara teori yang digunakan oleh penulis dengan proses yang terjadi pada era menteri Agama Wahid Hasyim dalam transformasi fakultas UII ke PTAIN, sehingga relevan atau tidaknya teori itu yang ingin lebih peneliti gali secara mendalam pada kajian ini, untuk itu penting dijelaskan secara proporsional komponen-komponennya teori *Interest Group Theory* sebagai pisau analisis peneliti dalam konteks fokus kajian peneliti, yakni pada penguatan pendidikan tinggi Islam dalam proses transformasi Fakultas Agama UII ke PTAIN.

Hasil dan Diskusi

Dalam penelitian ini ada beberapa hasil yang telah didiskusikan dengan para ahlinya, salah satunya ahli kajian politik pendidikan di Indonesia adalah M. Sirozi, kemudian Gus Sholudin Wahid selaku putra Wahid Hasyim, kemudian Pejabat Kementerian Agama Jakarta, serta dokumen-dokumen klasik di tiga kota besar, Kota Jombang, Yogyakarta dan Jakarta. Untuk itu dalam kajian ini dibahas tentang dua pembahasan yang relevan dengan fokus kajian politik pendidikan, *pertama* fokus akan membahas alasan-alasan mendasar munculnya program penguatan institusi pendidikan tinggi Islam itu ada di era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim, dan *kedua* fokus membahas tentang pola interaksi sosio politik yang dilakukan oleh Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim dalam penguatan institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Adapun pembahasannya sesuai di bawah ini.

1. Munculnya Program Penguatan Institusi PTI era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim

Sesuai dengan fakta-fakta sejarah, ide program penguatan institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim karena adanya faktor penting, yakni Pertama faktor internal dan kedua faktor eksternal. Faktor Internal dari Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim sendiri, yakni *Pertama*, adanya genitas karebet yang katuranggan, dimaksudkan adanya silsilah keturunan keratin yakni “Pangeran” dari pangeran Adiwijaya (Raja Pajang) atau biasa disebut Jaka Tingkir atau mas karebet yang masih

keturunan dari Brawijaya VI yang terkenal dengan sikap yang koopeatif “gotog royong” dan *tasammuh* “toleransi”.

Menurut Atjeh (2015, 47), telah tercatat dalam sejarah bahwa Joko Tingkir atau Pangeran Adiwijaya merupakan sultan pertama di Pajang yang tepatnya berada di daerah Jawa Tengah yang memiliki guru salah satunya adalah Sunan Kalijogo. Salah satu pola strategi yang dilakukan dalam memperkuat masa kerajaan sebagai Sultan adalah dengan lebih mengakomodir potensi-potensi pemuda yang cakap dan pandai untuk dijadikan sebagai bagian keluarga keraton, baik sebagai menantu atau sebagai anggota keraton yang memiliki posisi strategis. Selain itu, Pangeran Adiwijaya juga mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu menjaga kekerabatan dan kerukunan dengan lebih “toleran” dalam mensikapi setiap permasalahan sosial yang ada di kesultanan maupun di luar kesultanan. Wide Priyambono Giri (2012, 58-65) mengemukakan dalam jurnalnya, bahwa salah satu sikap toleran yang ada pada jiwa Jaka Tingkir (Pangeran Adiwijaya) adalah ketika ada permasalahan dengan perampok atau begal, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan dan mempunyai toleransi dan kesempatan memperbaiki kesalahan orang lain. Adiwijaya pernah menyampaikan “*Gegedhuge begal, aku ora bakal ngukum kowe sauger kowe sabalamu gelem mertobat lan ora mbaleni maneh tumindakmu sing nista iki.*” (Ketuanya begal, saya tidak tahu namamu. Tapi saya tidak akan menghukummu asal kalian semua mau bertobat dan tidak mengulangi lagi tindakanmu yang tercela ini). Unsur nilai budi pekerti mengembangkan sikap toleransi adalah saat mereka (para perampok) tidak dibunuh/dihukum oleh Jaka Tingkir jika mau bertobat di jalan yang lurus.

Kedua, Kuatnya motif Intrinsik ini merupakan tingginya kemauan dan perhatian Wahid Hasyim terhadap pendidikan dengan ala otodidiknya. *Ketiga*, Wahid Hasyim juga piawai dalam berorganisasi baik organisasi sosial, pendidikan maupun politik. Hal ini dibuktikan atas dasar fakta sejarah bahwa Menteri Agama Wahid Hasyim juga kerap mengajak anak-anaknya bekunjung kerumah tokoh-tokoh politik yang lain, Soebardjo selaku tokoh Partai Islam, Tokoh

Masyumi, Muhammad Natsir dan Prawoto mangkusasmito, selain itu juga sering berkunjung ke tokoh yang berbeda paham, misal Muhammad Yamin dan Mr Sartono dari partai Nasional Indonesia. tokoh politik nasional memang kerap singgah di rumah Wahid, sehingga Gus Sholudin mengatakan *“sampai-sampai teman saya saat itu bilang, kalau ayam di rumahmu bisa ngomong, pasti dia ikut ngomongin politik.”* (Nugroho, 2011, 36). Juga melakukan waeancara dengan Aisyah *“Putri ke empat Wahid Hasyim: Aisyah jua mengatakan “Bapak hendak menunjukkan kepada kami, ia tidak pernah membedakan orang”, imbuh Aisyah. Maka dengan pengalaman organisasi dan politiknya yang lebih dari 25 pengalaman organisasi selama ia hidup menjadi penting untuk di jadikan suri tauladan dalam berkiprah dalam pendidikan dengan tetap menjaga dan memperkuat nilai toleransi antar sesama, baik dengan lawan maupun kawan. Keempat, adanya kecenderungan berpikir Nasionalis modern yang moderat untuk menjawab kebutuhan sosiologis masyarakat di era tersebut dengan tetap mengedepankan progresifitas landasan. Hal ini terlihat dengan gagasan Wahid Hasyim memiliki keinginan yang kuat agar “para santri tidak lebih rendah kedudukannya dalam masyarakat daripada kaum barat”. Atjeh (2015, 171). Tentunya hal ini menjadi bagian praksis politik ideologisnya atas dasar diskriminasi sekaligus implikasi pendidikan oleh kolonial di Indonesia saat itu, sehingga upaya penguatan sumber daya manusianyapun tetap dimulai dari aspek pendidikan.*

Kelima, Luasnya pengetahuan yang moderat. Hal ini terlihat ketika berkali-kali Wahid Hasyim menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan, atau dalam bahasa Wahid, Logika. Dengan mengutip hadits “Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal”. Azra dan Umam (1992, 90), bahwa Wahid Hasyim pernah mengatakan; “dalam Islam,.. logika adalah pokok yang penting bagi menentukan benar atau salah suatu hal atau stau kejadian atau suatu peristiwa yang menurut logika tidak dapat diterima, di dalam anggapan Islam tidak bisa juga diterima. ...Islam tidak mengakui segala yang tidak tunduk pada logika”. Dan

Keenam, Wahid Hasyim juga terkenal cakap dan dapat diterima oleh semua golongan di eranya, sehingga sangat memungkinkan jika di era Kementerian Agama Wahid Hasyim mampu meletakkan pondasi “embrio” peradaban modern di Indonesia melalui gagasannya untuk mendirikan “Universitas Islam” di bawah Kementerian Agama walaupun yang berdiri adalah PTAIN di bawah Kementerian Agama.

Sedangkan faktor eksternalnya, terdiri dari *pertama* faktor Sosiologis, antarlain adanya kecemburuan sosial berdirinya UGM, lemahnya logika golongan mayoritas muslim, dan adanya kecenderungan kelompok “sekuler” yang menjauh dari syariat. Salah satu bukti argument dari ketua UGM yang membuat K.H. A. Wahid Hasyim terbangkitkan adalah ketika Prof. Sardjito menyatakan bahwa : *“Letak Universitas Gajah Mada di antara Candi Prambanan dan Borobudur, maka Universitas Gajah Mada haruslah kelak menjelmalkan rekarnasi prambanan dan Borobudur”.* (Suryanegara, 2016, 691). Mendengar isi pidato tersebut, maka kemudian Menteri Agama RIS KH. A. Wahid Hasyim berupaya semaksimal mungkin merencanakan dan mendirikan Universitas Islam beserta Perpustakaan. Yusuf, dk, (2017, 67).

*Kedua, adanya pengaruh partisipasi Rezim dengan memberikan pilihan transformasi FA-UII ke PTAIN yang dikuatkan oleh PP. No. 34 tahun 1950 tentang pendirian PTAIN. Ketiga, adanya faktor politik yakni, adanya waktu yang cukup lama, menguatnya reaksi golongan nasionalis agamis yang didukung atas keterlibatan masyumi dengan reaksi kooperatif dari golongan nasionalis dan agamis. Hal ini seiring dari hasil wawancara dengan Gus Sholahudin Wahid (Jombang, 7 April 2018), Salah satu putra dari K.H. Abdul Wahid Hasyim, terkait dengan ide atau program penguatan pendidikan tinggi Islam di Indonesia itu muncul di era Menteri Agama Wahid Hasyim, beliau memberikan jawaban dua hal, “*pertama mbah Wahid Hasyim punya kesempatan yang lama menjadi menteri agama, sebenarnya ndak lama ya, cuma jika dilihat dari sistem pada waktu itu ya lumayan lama, tiga kabinet, cukup panjang lah usia 3 tahun, sehingga punya banyak waktu untuk**

memikirkan banyak hal. Kedua, Pak wahid hasyim punya perhatian untuk mendirikan PTAIN itu, artinya PTAIN itu diperlukan untuk memajukan umat Islam di Indonesia kedepan, saya fikir itu yang paling awal ya".Untuk itu maka penting bahwa masa yang cukup dalam "posisi politik" Kementerian, menjadikan Wahid Hasyim lebih mudah untuk mengorganisir program-program konstruktif berbasis kebangsaan dan keuamtn tersebut.

Faktor eksternal keempat adalah adanya pengaruh dan keterlibatan tokoh, secara ideologis terbangun oleh tokoh sentralnya yakni K.H. Hasyim Asy'ari yang responsif atas fakta sosial, kemudian K.H. Fakih Usman yang kooptatif selaku Menteri Agama RI Yogyakarta, dan K.H. Maskur yang selalu membantu pelaksanaan program era Kementerian Wahid Hasyim dan bijak ketika setiap menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Tentu hal ini menjadi bagian motivasi eksternal bagi Wahid Hasyim dalam mengaktualisasikan program dan gagasannya di eranya.

2. Pola Interaksi sosio-politik era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim

Adapun pola interaksi dalam penguatan institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia era Menteri Agama Wahid Hasyim ada beberapa pola interaksi, antarlain; *Pertama*, pola interaksi asosiatif kooperatif, dimaksudkan bahwa era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim memiliki karakteristik kooperatif dengan siapapun dengan tujuan untuk menyatukan persepsi-persepsi kelompok, baik kelompok Mayoritas, Sekuler dan Minoritas. Penulis berasumsi bahwa kooperasi dalam penerimaan PTAIN di era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim merupakan sikap yang lebih kooptatif.walaupun prosesnya juga koalitif dengan struktur kelompok lain dan terlihat sekilas *bargaining* dengan rezim. Hal ini tentunya juga tercermin dalam kepribadian Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim sendiri. Salah satunya pernyataan dari Isa Al-Anshary, salah seorang pimpinan persatuan Islam (PERSIS) saat itu, "*Wahid Hasyim adalah sosok pemimpin yang tenang dan dapat menyatukan berbagai aspirasi. Dia adalah organisatoris ulung, pandai dan bijaksana*

memainkan "kartu" perjuangan.(Azra dan Umam, 1998, 102).Komitmennya tentang persaudaraan menurut Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim (1950,5)pada tulisannya "*Sikap dan semangat bergolong-golong itu di dalam lingkungan tanah air kita, apabila diterus-teruskan tentu akan berakibat rusaknya kemurnian persaudaraan kita sebangsa*". Ini tentunya juga salah satu aspek implikas dari penanaman ideologi ayahnya K.H. Hasyim Asy'ari tentang pentingnya kerjasama dan persaudaraan. (Misrawai, 2013, 238-240).

Pola interaksi *Kedua*,yaknipola interaksi asosiatif akomodatif era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim terlihat adanya *equilibrium* atas gagasan dan ekspektasi "Universitas Islam" nya walaupun belum terlaksana dengan realitas sosial atas kemajuan kelompok "Sekuler" dengan landasan sikap "*Tasammuh*" yang tinggi. Dalam konteks pendidikan, Menteri Agama K.H. A. Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim (1950, 4) juga menyampaikan pidatonya "*pendidikan ketimuran tidaklah dimaknakan sederhana, yaitu suat pendidikan yang didasarkan atas anggapan-anggapan orang timur, adat istiadat, bahasa timur, pendidikan timur lebih dari hal itu, ialah pendidikan yang didasarkan atas filsafat timur, filsafat kerohanian*".Selain itu, Nugroho (2017, 51) juga mengemukakan bahwa "*Insting Gus Wahid Bagus, "Jika ada kader yang dianggap bagus, dia dekati dan masuk lingkaran inti,imbuh Muchit Muzadi"*.(Hasil wawancara Nugroho dengan Muchit Muzadi (salah satu alumni di pondok pesantren Tebu Ireng yang merupakan santri dari K.H. A. Wahid Hasyim sekaligus sesepuh pesantren Tebu Ireng).Dengan demikian jelas, bahwa pola interaksinya lebih akomodatif progresif yang sesuai dengann kebutuhan di eranya.

Pola interaksi *Ketiga*, di Era Menteri Agama K.H.A. Wahid Hasyim dalam penguatan pendidikan tingginya adalah pola disosiatif kompetitif, pola interaksi disosiatif kompetitif ini dimaksudkan adanya proses kompetisi yang lebih bersifat kulturalistik edukatif, yakni atas berdirinya UGM yang di asumsikan sebagai representasi spirit gagasan "kolonialisme" untuk dikotomik pengetahuan dari pengetahuan agama dengan tetap atas pondasi kepentingan kebangsaan dan keumatan dengan tidak ada aspek "kekerasan". Hal ini jelas

dibuktikan pada permasalahan “sentimenisme” golongan di eranya agar tidak terlalu menjalar dan melebar, masyarakat butuh pemahaman secara kompleks, maka juga diperjelas oleh Wahid Hasyim ketika membuka Pendidikan Tinggi Islam di Yogyakarta. Adapun pidato peresmian PTAIN di Yogyakarta Wahid Hasyim (2011, 141-142), mengemukakan; *“PTAIN yang diresmikan pada hari ini, mungkin timbul pertanyaan disebabkan dugaan, seolah-olah PTAIN ini bagi agama Islam yang merupakan usaha dari Kementerian Agama, ada maksud melebihi golongan Islam dan mengurangi harga golongan agama lainnya, yang sebenarnya tidaklah demikian. Bagi golongan Islam sekolah agama yang mengajarkan dan memelihara pendidikan agama dengan dasar pengetahuan betul-betul bernilai Universitas belumlah ada di Indonesia, sedang bagi golongan yang lain sudah ada sekolah tinggi teologi yang dapat dibanggakan dan membuahkan cerdik pandai bagi kepentingan masyarakat dan Negara”*. Tentunya hal ini salah satu bentuk ekspektasinya terhadap eksistensi Kementerian Agama untuk memiliki “Universitas Islam” mandiri, dan setidaknya PTAIN lah yang memungkinkan di era tersebut untuk menjadi cangkuk dan modal utama untuk mengukuhkan menjadi Universitas pada masa berikutnya. Maka hal ini dijadikan oelh Menteri Agama Wahid Hasyim sebagai embrio yang kompetitif dengan Universitas lain yang hanya lebih fokus pada teologi dan pendidikan “Umum”.

Atjeh, (2015, 878) mengemukakan bahwa spirit Pidato di atas yang disampaikan dengan landasan keagamaan dan kenegaraan dengan tema *“Perguruan Tinggi Islam Negeri”* ini merupakan pidato yang diucapkan pada pembukaan dan penyerahan PTAIN (perguruanTinggi Agama Islam Negeri) di Yogyakarta pada 26 September 1951 yang kemudian diterbitkan pada Mimbar Agama November, 1951. Pada pidatonya berisi ini dengan beberapa point penting, antarlain; *pertama*, perguruan tinggi agama Islam negeri didirikan sebagai jawaban atas sumber daya manusia islam di Indonesia yang masih lemah dan lambat di Indonesia, *kedua*, beliau juga menegaskan adanya perbedaan falsafah hidup yang digunakan antara islam Indonesia dengan islam di negeri lain, salah

satu upayanya adalah dengan menempatkan pengetahuan yang tidak boleh dikungkung oleh perasaan keagamaan yang sempit. *Kedua*, perguruan tinggi Islam negeri ini sebagai media dalam memandang pengetahuan dari sudut logika dan rasionalitas yang tinggi dengan tetap menundukkan politik pada ilmu, sehingga tujuan politik lebih pada nilai-nilai “Kemaslahatan dan Kemanusiaan” dan bukan “kekuasaan”. *Ketiga*, Menteri Agama Wahid Hasyim menegaskan kembali adanya syarat mutlak yang harus bersanding, yakni Ilmu pengetahuan dan taqwa, karena kedua unsur inilah sehingga kehidupan masyarakat lebih berkembang dengan tetap berkarakter atau berkepribadian yang baik. Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim menegaskan bahwa *“Kemajuan otak yang tidak disertai dengan kemajuan budipekerti yang baik atau taqwa, telah menyebabkan nilai dan pandangan manusia jadi berubah banyak, bukannya ke atas, melainkan ke bawah, hingga suatu kejahatan kecil seperti merusakkan jiwa atau nyawa seseorang, di anggap perbuatan jahat, tetapi merusakkan jiwa atau nyawa atau bangsa dengan cara damai kepada seluruh negeri, di anggap sebagai pahlawan yang berharga atau mendapat nama baik yang tinggi”*. (Atjeh, 2015, 881-882)

Kelima, salah satu tujuan dan harapan beliau Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim dalam peresmian perguruan tinggi islam adalah agar terlahir insan yang cerdik, pandai, berilmu agama dan umum serta bertaqwa kepada Allah swt. Jika harapan dan tujuan tersebut dapat di akomodir sampai sekarang, tentunya tidak akan terjadi perselisihan yang mengakibatkan kekerasan dan ketidak adilan. Akan tetapi jika berasumsi realitas hari ini, sudah tepat setidaknya apa yang dikhawatirkan oleh Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim benar-benar terjadi, yakni pertimbangan politik lebih atas dari pada pertimbangan ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan menjadi pelayan hawa nafsu. Hal ini tentunya yang menjadi problem serius pendidikan di Indonesia. Maka dalam konteks politik, menjadi penting bahwa ilmu benar-benar mandiri dari politik, sehingga mampu memberikan nilai-nilai

keadilan, kemanusiaan dan kesejahteraan bagi umat di Indonesia, khususnya umat islam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perolehan dokumen dan wawancara, terdapat dua konstruksi *finding* penting. Pertama, munculnya program penguatan institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim adalah adanya praksis “**Motif Imbang**” antara faktor internal dan eksternalnya, antara permasalahan dengan cita-cita yang direfleksikan dengan menggunakan pendekatan rasional dan spiritual, yang ditegaskan dalam konsepsinya yakni adanya pengetahuan dan taqwa”, keduanya harus saling melengkapi yang ditegaskan melalui program politik gagasan institusional “Universitas Islam” yang nondiktomis, sehingga PTAIN dijadikan sebagai embrio formalisasi pendidikan tinggi Islam di bawah kontrol Kementerian Agama.

Temuan kedua, sesuai konstruksi beberapa pola interaksi yang ada di eranya, maka pola interaksi yang digunakan era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim dalam proses penguatan institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia adalah pola interaksi “**Asosiatif Akomodatif Kompromistis**”, merupakan proses interaksi yang memiliki indikasi yang imbang dengan golongan sekuler “bahkan *Bergaining* dengan Rezim” dengan cara yang lebih adaptif serta memprioritaskan stabilitas dan kepentingan semua golongan dengan sikap yang kompromistis, *tassammuh* dan *tawassuth* untuk mengurangi pertentangan dengan tujuan mendapatkan solusi alternatif dengan menjadikan “persatuan” sebagai refleksi nilai-nilai berbangsa dan pancasilais.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. (2013). “*Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*”, Jakarta: Rineka Cipta.
- Atjeh, H. Abubakar. (2015). *Sejarah Hidup K.H. Abdul Wahid Hasjim*. Jombang: Tebu Ireng. 47,
- Azra dan Umam. (1998). *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik*. Jakarta: INIS dan PPIM Depag RI.
- B.J. Boland. (1985). *The Struggle Of Islam In Modern Indonesia*. Trj. Jakarta: PT. Grafitri Pers.
- Bakker dan Zubair. (1994). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Cresswell, John W. (2010). *Research Design” Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Thir Edition*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewanto, Nugroho, (2011). “*Menteri Agama Wahid Hasyim untuk Republic dari Tebuireng*”, Ibid. Tempo, Jakarta : hlm. 36.
- Dhofier, Zamakhsyari. (2011). *Tradisi Pesantren : Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Giri, Wide Priyambono., “*Nilai Budi Pekerti Dalam Cerbung Jaka Tingkir Karya Ambarwati, Majalah Djaka Lodang Edisi 17 Sampai 25 Tahun 2012*” E-Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Muhammadiyah Purworejo., Vol. / 08 / No. 02 / Maret 2016, hal. 58-65.
- Gunawan, Imam. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Metode*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasyim, A. Wahid. (1950). *Pendidikan Ketuhanan*. Mimbar Agama, Majalah resmi yang terbit berkala dari Kementerian Agama Jilid I. No. 56. Jakarta. Kementerian Agama. hal. 4.
- , (1950) “*Latihan Lapar untuk Kebahagaan Hidup dan Perdamaian Dunia*” Djakarta: Penjiaran kementerian Agama., P. 5.
- , (2011). *Mengapa Saya Memilih Nahdlatul Ulama (Kumpulan tulisan Wahid Hasyim dengan pengantar dari putranya Sholahuddin Wahid)*. Jakarta: Mizan.
- M. Sirozi, “*Politics of Educational Policy Production in Indonesia: A Case Study of the Roles of Muslim Leaders in the leaders in the Establishment of the Number 2 Act of 1989*”. Disertasi (Australia: Monast University). 2004

- .(2010). *Politik Pendidikan dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , (2013). *Konteks dan kerangka konseptual Politik Pendidikan*. Palembang :Noer Fikri Offset.
- Misrawi, (2013). *Hadratussyaiikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keumatan dan kebangsaan*. Jakarta. Buku Kompas. Hal.238-240.
- Nata, Abudin. (2014). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- , (2001). *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Noer, Deliar. (1987). *Partai Islam di Pentasi Nasional 1945-1965*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- , (1983). *Administrasi Islam Di Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: CV. Rajawali Pers.
- Sanjaya, Wina.(2013)*Metode Penelitian Pendidikan; Jenis, Metode dan Prosedur*". Jakarta: Prenda Media Group.
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, Ismail. (2014). *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Keresidenan Palembang, 1925-1942*. Yogyakarta: CV. Idea Sejahtera.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. (2016). *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jilid kedua*. Bandung: Surya Dinasti. Hal. 287.
- Yusuf dkk.(2017). *Kaleidoskop Kementerian Agama Republik Indonesia 1946-2016, Jejak Langkah dari Masalalu*. Jakarta:Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi Balitbang dan Diklat Kementerian Agama. hal. 67.